

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR GUNA MENINGKATKAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KOTA PEKALONGAN**

Oleh:  
Roy Ardiansyah, Sundarso, Tri Yuniningsih.

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 12693  
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465404  
Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)  
Email: [royardiansyah15@yahoo.com](mailto:royardiansyah15@yahoo.com)

**ABSTRACT**

*Parking is part of a sub-system of the implementation of the road freight traffic carried by local governments, in order to improve the organization of the society in the field of environmental management, order and smooth flow of traffic as well as a source of revenue (PAD). Pekalongan city parking retribution policy refers to the Regional Regulation No. 21 of 2011 on Service Fees for parking. Has the objective to increase transparency and accountability, and to support the process of monitoring the implementation of parking retribution. These objectives can be achieved through the implementation of the views of the appropriateness of the policy, the accuracy of the executor, the target accuracy, precision and accuracy of the process environment. Parking Retribution Policy Implementation process in achieving the objectives are factors inhibiting and supporting factors. But in its application in the field face many obstacles that the implementation of parking charges less walking is not optimal. This research was conducted with descriptive qualitative research methodology that aims to identify and analyze the implementation of parking charges implementation of the results of this study is not optimal due to the presence of obstacle factor the resource factor in the number of staff employees and the bureaucratic structure of the relevant Department. Parking attendants themselves are also often delayed depositing retribution results due to use such proceeds to their daily lives. In addition, public opinion against the parking retribution to be indifferent to never ask for proof of parking tickets after paying. Based on the results of these studies recommended to be done to increase supervision of the implementation of parking retribution. This is for the implementation of parking retribution to the maximum*

**Keywords : Retribution Parking , Implementation , and Policy**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perparkiran merupakan bagian dari sub sistem lalu lintas angkutan jalan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan penyelenggaraan kepada masyarakat di bidang perparkiran, penataan lingkungan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas serta sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu penyumbang pendapatan yang dominan adalah retribusi parkir. Selain itu retribusi parkir memberikan pengaruh dalam meningkatnya pendapatan asli daerah dan pembangunan daerah. Karena retribusi parkir merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang selama ini memberikan pemasukan yang cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah.

Permasalahan retribusi parkir khususnya di Kota Pekalongan seakan menjadi permasalahan yang tidak ada ujungnya. Mulai dari penerimaan retribusi parkir yang masih banyak menemukan kendala dalam pengelolaannya dimana masih banyak kawasan parkir yang strategis tetapi tidak terdaftar di Pemerintah Daerah. Parkir sebagai kawasan perparkiran serta permasalahan retribusi parkir di tepi jalan umum yang aturannya sangat tidak jelas dan adanya oknum yang tidak bertanggung jawab yang menggunakan momen tersebut untuk meraup keuntungan.

Masalah lain yang menjadi kendala dalam pemungutan jasa retribusi parkir masih belum terlaksana dengan optimal. Sesuai dengan keterangan yang dikemukakan oleh beberapa juru parkir bahwa penghasilan parkir tidak diberikan seluruhnya kepada petugas pemkot dan petugas hanya memberikan karcis yang belum tentu dihabiskan oleh juru parkir.

Berdasarkan Permasalahan diatas menjadikan alasan peneliti untuk melakukan

penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan”**.

### **B. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan retribusi parkir guna meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Pekalongan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan retribusi parkir di Kota Pekalongan

### **C. Kerangka Teori**

#### **C.1 Administrasi Publik**

Ilmu administrasi publik merupakan studi interdisipliner, yaitu suatu studi yang memiliki berbagai macam titik perhatian. Administrasi publik menurut Nicholas Henry (Pasolong, 2011:8) adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Lalu menurut George J. Gordon (syafie, 2006 : 25) administrasi publik dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif serta pengadilan.

#### **C.2 Paradigma Administrasi Publik**

Menurut Kuhn (1970) dalam Yeremias (2008:31), paradigma merupakan suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar, atau cara memecahkan sesuatu masalah, yang dianut oleh suatu masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu. Sedangkan

menurut Inu Kencana Syafii (2006:26) mengatakan bahwa paradigma adalah corak berpikir seseorang atau sekelompok orang.

Dalam penelitian ini lebih cenderung mengarah kepada paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik, dimana paradigma ini sangatlah berkaitan dengan teori organisasi dan kebijakan publik yang ada. Selain itu juga paradigma ini melihat pengukuran berhasil atau tidaknya kebijakan yang dibuat. Pada penelitian ini juga muncul masalah-masalah dan kepentingan publik yang mana hal ini menjadi lokus dari paradigma ini.

### **C.3 Kebijakan Publik**

Administrasi publik sangat berkaitan erat dengan kebijakan publik, dimana administrasi publik berperan besar dalam pelaksanaan kebijakan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhan public.

Implementasi merupakan suatu tahap dimana kebijakan yang telah diadopsi tersebut dilaksanakan oleh unit-unit administrative tertentu dengan memobilisasikan dan sumber daya yang ada

Dalam penelitian ini, peneliti lebih menekankan perhatian pada proses implementasi yang dilaksanakan, bagaimana proses pelaksanaan yang dilakukan terkait kebijakan retribusi parkir guna meningkatkan PAD Kota Pekalongan.

### **C.4 Pendekatan Dalam Implementasi Kebijakan**

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *top-down* untuk mengimplementasikan suatu kebijakan. Karena fokus peneliti tertuju pada kebijakan dan berusaha untuk memperoleh fakta-fakta apakah kebijakan tersebut ketika diimplementasikan mampu mencapai tujuannya atau tidak. Apabila ada persoalan-

persoalan yang berkaitan dengan implementasi suatu kebijakan dan atas dasar faktor-faktor yang membuat implementasi tersebut gagal, peneliti akan mencari solusi untuk persoalan tersebut. Selain itu peneliti mengidentifikasi apakah kebijakan tersebut mencapai tujuan dan dapat diterima dengan baik oleh kelompok sasaran.

### **C.5 Implementasi Kebijakan Publik**

(Wahab, 2002:59) menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Saat ini pengimplementasian suatu kebijakan atau program di Indonesia masih banyak mengalami hambatan atau bahkan kegagalan. Untuk itu dalam menyelesaikan sebuah masalah publik tidak hanya dibutuhkan suatu kebijakan, tetapi juga cara/petunjuk tentang bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan sehingga dapat menyelesaikan masalah.

### **C.6 Model Implementasi Terpilih**

Dalam hal ini peneliti mengambil teori implementasi kebijakan dari **George C. Edwards III**, karena fokus penelitian lebih tertuju kepada lembaga atau organisasi yang menangani implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Pekalongan, sehingga lebih menekankan pada unsur-unsur yang ada dalam sebuah organisasi atau lembaga seperti komunikasi, disposisi, struktur birokrasi, sumberdaya. Faktor yang mempengaruhi yang terdapat dalam George C. Edwards III, peneliti berpendapat bahwa dapat sesuai untuk menggali fenomena yang ada dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Pekalongan.

### **a. Komunikasi**

Komunikasi faktor yang mempengaruhi dalam menyampaikan informasi dari salah satu pihak ke pihak lain, dalam penelitian implementasi kebijakan retribusi parkir pihak yang dimaksud petugas Dinas Perhubungan Pariwisata dan Kebudayaan kepada juru parkir mengenai pelaksanaan aturan pemungutan tarif parkir.

### **b. Sumber daya**

Sumber daya dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Pekalongan faktor yang mempengaruhi terkait fenomena adanya sumber daya, dalam pelaksanaan kegiatan retribusi parkir di Kota Pekalongan. Baik sumber daya manusia, ataupun fasilitas yang akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan.

### **c. Disposisi**

Salah satu yang mempengaruhi implementasi kebijakan retribusi parkir ini merupakan sikap dari implementor dalam menjalankan implementasi kegiatan retribusi parkir, apakah implementor memiliki tingkat komitmen dan kejujuran atau tingkat demokratisasi dalam pelaksanaan suatu program.

### **d. Struktur Birokrasi**

Ketika membahas mengenai suatu lembaga atau organisasi yang melaksanakan suatu kegiatan kebijakan maka tidak bisa lepas dari adanya faktor struktur birokrasi didalamnya hal ini terkait dengan pola-pola hubungan yang terjadi didalamnya, dalam pelaksanaan implementasi kebijakan retribusi parkir terkait dengan kejelasan SOP dalam prosedur-prosedur kerja yang ada didalam struktur birokrasi.

## **D. Metode Penelitian**

### **D.1 Desain Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan paradigma penelitian interpretivisme atau

pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang luas tentang makna dan konteks tingkah laku dan proses terjadinya tingkah laku tersebut. Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif dimana penyajian data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar dari pada angka.

### **D.2 Jenis Penelitian**

Dalam Penelitian Implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Pekalongan penulis memilih jenis penelitian fenomenologis hal ini dikarenakan penulis melihat secara dekat melalui pengalaman-pengalaman informan dalam melaksanakan kebijakan retribusi parkir dengan melakukan wawancara terhadap beberapa informan.

### **D.3 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan.

### **D.4 Situs Penelitian**

Peneliti mengambil situs penelitian di Dinas Perhubungan Pariwisata dan Budaya Kota Pekalongan.

### **D.5 Jenis Data**

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, dan foto.

### **D.6 Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh dari secara langsung dari informan, melalui kegiatan wawancara. Penulis mengajukan beberapa pertanyaan yang bersifat terbuka sehingga penulis

mendapatkan gambaran-gambaran jelas mengenai pelaksanaan kebijakan retribusi parkir guna meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Pekalongan.

#### **b. Data Sekunder**

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur atau sumber-sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti seperti data dari Dinas Perhubungan Pariwisata dan Budaya Kota Pekalongan.

### **D.7 Subjek Penelitian**

Informan adalah orang yang dipilih yang dapat menerangkan dan memberikan informasi sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Teknik pemilihan informan pada penelitian ini menggunakan metode *nonprobability* dengan teknik *purposive sampling*. Teknik pemilihan informan dengan pertimbangan orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa diharapkan, sehingga memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi social yang diteliti. Penulis memiliki pertimbangan untuk memilih informan yang akan dimintai keterangan untuk penelitian di lapangan, yaitu sebagai berikut:

1. Informan yang mengetahui dengan jelas tentang kebijakan retribusi parkir dalam hal ini Kasi Pembinaan Lintas dan Perparkiran Dinas Perhubungan Pariwisata dan Budaya Kota Pekalongan.
2. Informan yang bertugas baik personel Dinas Perhubungan Pariwisata dan Budaya Kota Pekalongan maupun juru parkir di lapangan.

### **D.8 Teknik Pengambilan Data**

Setelah informan ditentukan dan ditetapkan kriterianya, maka peneliti langsung melakukan pengumpulan data atau informasi dengan teknik yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan

metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

### **D.9 Kualitas Data**

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data berdasarkan teknik triangulasi dengan sumber yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

### **D.10 Analisis dan Interpretasi Data**

Dalam menganalisis data mengenai implementasi kebijakan retribusi parkir guna meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Pekalongan, peneliti melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Peneliti terlebih dahulu melakukan observasi awal kelokasi penelitian untuk mendapatkan data. Observasi awal dilakukan untuk mendapatkan data hasil/penelitian pendahuluan (*pra-survey*) dan data pendukung lain yang berkaitan dengan fokus penelitian.
2. Peneliti mengumpulkan data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi selama di lapangan sehingga dihasilkan data primer dan data sekunder.
3. Setelah dihasilkan data primer dan sekunder peneliti mereduksi data yang diperoleh selama di lapangan dari sesuatu yang kompleks ke dalam bentuk yang lebih sederhana dengan cara merangkum hasil wawancara, memilih hal-hal pokok. Menentukan hal-hal penting sehingga memberikan gambaran yang tajam mengenai hasil dari pengamatan dan mempermudah peneliti jika itu diperlukan.
4. Setelah data terkumpul dan dikategorikan secara rapi, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk

uraian teks kemudian peneliti melakukan analisis dan interpretasi terhadap data tersebut.

5. Peneliti melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan penyajian data yang telah dianalisis dan diinterpretasikan sehingga menciptakan pengetahuan baru mengenai suatu objek yang diteliti yang semula kabur menjadi lebih jelas.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Proses Implementasi Kebijakan**

#### **Retribusi Parkir**

##### **1. Komunikasi**

Kebijakan retribusi parkir dapat dilaksanakan dengan efektif jika informasi yang ada dapat disampaikan dengan jelas, tepat, dan mudah dipahami. Dalam implementasi retribusi parkir di Kota Pekalongan, keefektifan dapat dilihat dari kejelasan informasi, konsistensi informasi dan transmisi atau penyampaian informasi.

##### **2. Sumber Daya**

Sumber daya merupakan sumber energi dalam pelaksanaan sebuah kebijakan, karena tanpa adanya sumber daya kebijakan tidak akan berjalan, sama halnya dengan kebijakan retribusi parkir di Kota Pekalongan tidak akan berjalan atau terlaksana tanpa adanya sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia baik kualitas dan kuantitas, serta informasi.

##### **3. Disposisi**

Implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Pekalongan dapat efektif apabila adanya kesesuaian sikap antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan implementor. Sehingga jika implementor tidak bersikap sesuai dengan pembuat kebijakan maka tidak akan efektif.

Untuk melihat keefektifan yang ada dalam disposisi, maka dapat melihat dari loyalitas implementor, dan kejujuran implementor.

### **4. Struktur Birokrasi**

Implementasi kebijakan retribusi parkir merupakan kebijakan yang dibuat Pemerintah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah Kota Pekalongan. Dalam upaya pencapaian kebijakan ini, maka diperlukan struktur birokrasi untuk mendukung efektifitas pelaksanaan kebijakan retribusi parkir di Kota Pekalongan. Maka hal ini dapat dilihat dari, tugas pokok dan fungsi serta standar operasi prosedur yang dilakukan oleh implementor.

### **B. Faktor-Faktor yang Mendukung dan Menghambat Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Kota Pekalongan**

#### **1. Ketepatan Kebijakan**

Tujuan dalam kebijakan retribusi parkir sebagai berikut:

*Pertama*, meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Pekalongan. Dalam hal ini yang ditemukan dilapangan adalah kebijakan retribusi parkir di Kota Pekalongan mengalami peningkatan target dalam pelaksanaannya.

*Kedua*, menciptakan strategi yang akan digunakan dalam melaksanakan retribusi parkir. Hal yang ditemukan dilapangan ialah strategi sudah dijalankan dengan baik, hal itu terlihat dari adanya survey lahan baru yang dilakukan implementor

#### **2. Ketepatan Pelaksanaan**

Dalam kebijakan retribusi parkir lembaga yang diberikan wewenang untuk menjalankan kebijakan ini adalah Dinas Perhubungan Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pekalongan. Dinas Perhubungan

Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pekalongan juga bekerjasama dengan lembaga lain seperti Kepolisian, Satpol PP dan SubDenpom. Pada Kepolisian sendiri ada Unit Serse dan Lalu Lintas dimana Unit Serse untuk mengamankan apabila ada aksi premanisme yang mengganggu juru parkir dan Lalu Lintas untuk pengaturan rambu yang harus dipatuhi. Untuk Satpol PP dan SubDenpom sendiri melakukan penertiban apabila terjadi parkir liar menumpuk yang dapat mengakibatkan kemacetan lalu lintas.

### **3. Ketepatan Target**

Dalam ketepatan target mengenai implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Pekalongan menyangkut dua hal yakni, (1) kesesuaian target sasaran dan (2) respon masyarakat mengenai tarif parkir.

### **4. Ketepatan Lingkungan**

Ketepatan Lingkungan terdapat dua lingkungan yang menentukan implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Pekalongan yaitu Lingkungan Endogen dan Lingkungan Eksogen. Lingkungan Endogen yaitu interaksi antar lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan yang terkait. Sedangkan lingkungan Eksogen mengenai pendapat atau persepsi publik terkait kebijakan retribusi parkir di Kota Pekalongan.

### **5. Ketepatan Proses**

Implementasi kebijakan retribusi parkir yang terakhir dapat dilihat dari ketetapan proses yang terdiri atas : (1) *Policy Acceptance* (2) *Policy Adaption*. *Policy Acceptance* adalah pemahaman Dinas atau instansi yang menangani kebijakan bahwa kebijakan retribusi parkir merupakan kebijakan yang diperlukan dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kota Pekalongan. Sedangkan *Policy Adaption*, Pada tahap ini implementor bukan pada

tahap memahami saja, akan tetapi menerima kebijakan retribusi parkir dengan mulai mempersiapkan masing-masing syarat yang dibutuhkan.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Kebijakan retribusi parkir di Kota Pekalongan merupakan kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Pekalongan. Retribusi parkir sendiri merupakan penyumbang pendapatan terbesar kedua setelah pendapatan retribusi pasar. Implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Pekalongan sendiri masih belum berjalan secara maksimal. Pada implementasi kebijakan retribusi parkir terdapat berbagai kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, usaha yang dilakukan Dinas terkait untuk mengatasi permasalahan parkir kurang optimal. Hal itu karena masih adanya hambatan yang dialami. Permasalahan salah satunya kurang pantauan dari personil Dinas terkait di lapangan. Kurangnya pantauan tersebut menyebabkan adanya lahan parkir yang berpotensi tidak dikelola melainkan digunakan pedagang kaki lima untuk berjualan. Padahal lahan yang berpotensi tersebut sangat berpengaruh terhadap pendapatan. Selain itu juga kurangnya pantauan tersebut menyebabkan juru parkir tidak melaksanakan tepat waktu pada jam kerja yang sudah ditetapkan. Permasalahan retribusi parkir khususnya di Kota Pekalongan seakan menjadi permasalahan yang tidak ada batangnya. Mulai dari masalah penerimaan retribusi parkir yang masih banyak menemukan kendala dalam pengelolaannya dimana masih banyak kawasan parkir yang strategis tetapi tidak terdaftar di Pemerintah Daerah. Parkir sebagai kawasan perparkiran serta

permasalahan retribusi parkir di tepi jalan umum yang aturannya kurang maksimal dan adanya oknum yang tidak bertanggungjawab yang menggunakan momen tersebut untuk meraup keuntungan. Berdasarkan penelitian tentang implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Pekalongan, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki.

Dalam implementasi kebijakan retribusi parkir faktor pelaksana merupakan yang terpenting dalam kegiatan tersebut. Hal itu dikarenakan ketepatan pelaksana yang nantinya akan mengelola retribusi parkir. Selain itu juga ketepatan pelaksana melihat bagaimana ketepatan lembaga yang diberikan wewenang untuk menjalankan kebijakan. Apakah telah dilaksanakan oleh pelaksana yang kredibel serta tepat dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada.

Pada implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Pekalongan aktor pelaksana sudah tepat yaitu Dinas Perhubungan Pariwisata dan Kebudayaan pada bidang lalu lintas dan perparkiran. Bidang ini memiliki tugas untuk melaksanakan, monitoring, dan evaluasi kegiatan retribusi parkir di Kota Pekalongan.

### **1. Ketepatan Kebijakan**

Kota Pekalongan sendiri dalam menerapkan kebijakan retribusi parkir perlu adanya ketegasan yang baik. Melalui Dinas Perhubungan Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pekalongan kebijakan yang diberikan sudah jelas, untuk juru parkir sendiri mendapatkan surat tugas, lalu ada surat perjanjian dimana perjanjian itu mengenai kewajiban juru parkir untuk tiap bulan menyetorkan hasil retribusi parkir ke Dinas. Namun disisi lain juru parkir sering terlambat dalam menyetorkan hasil retribusinya. Hal ini yang harus diperhatikan

oleh Dinas agar kedepannya juru parkir dapat tepat waktu dalam penyetoran retribusi parkir.

### **2. Ketepatan pelaksana**

Pelaksana retribusi parkir di Kota Pekalongan dilaksanakan oleh pelaksana yang tepat yaitu bidang lalu lintas dan perparkiran pada Dinas Perhubungan Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pekalongan. Bidang ini memiliki tugas untuk melaksanakan, monitoring, dan evaluasi kegiatan retribusi parkir di Kota Pekalongan. Sebelum retribusi parkir di kelola oleh Dinas ada pihak ketiga yang mengelola retribusi parkir. Tetapi dengan adanya pihak ketiga tersebut hasil yang dicapai tidak sesuai target. Pihak ketiga kurang sepatutnya mengenai kebijakan yang diberikan oleh Dinas terkait. Sehingga saat ini kegiatan retribusi parkir dikelola langsung oleh Dinas Perhubungan Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pekalongan.

### **3. Ketepatan Target**

Setelah retribusi parkir dikelola langsung oleh Dinas terkait, untuk mencapai target yang ditetapkan terkadang mengalami beberapa kendala yang dialami. Apabila ada juru parkir yang sakit tidak bisa melakukan tugasnya sehingga ada tempat-tempat parkir tertentu yang tidak bisa mendapatkan retribusi parkir. Selain itu juga dukungan dari masyarakat sebagai target juga mempengaruhi implementasi kebijakan. Respon masyarakat sendiri sebenarnya positif pada tarif parkir. Hal itu karena tidak adanya aduan dari masyarakat mengenai tarif parkir. Tetapi masyarakat bersikap acuh dengan tidak pernah meminta bukti karcis parkir setelah membayar. Selain itu masih terdapatnya praktik premanisme juga membuktikan bahwa kebijakan retribusi parkir ini belum sepenuhnya mampu

mengatasi permasalahan parkir di Kota Pekalongan.

#### **4. Ketepatan Lingkungan**

Interaksi antara pemerintah dan Dinas terkait terjalin dengan baik dilihat dari adanya rapat gabungan dan operasi gabungan yang sering diadakan. Dinas terkait sendiri juga memberikan pembinaan terhadap juru parkir agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di lapangan. Selain itu, dalam melaksanakan retribusi parkir Dinas Perhubungan Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pekalongan bekerja sama dengan lembaga lain seperti kepolisian, satpol pp, dan SubDenpom. Kepolisian sendiri terdiri dari satlantas, satreskrim dan sabhara. Lembaga-lembaga ini yang nantinya bertugas untuk menanggulangi apabila ada aksi premanisme yang mengganggu juru parkir di lapangan.

#### **5. Ketepatan Proses**

Dalam persiapan pelaksana sendiri telah dipersiapkan oleh Dinas terkait melalui bidang lalu lintas dan perparkiran dengan menyiapkan standar operasional yang sistematis dalam pelaksanaan retribusi parkir. Kemudian pada kesiapan fasilitas yang diberikan dapat dilihat dari tersedianya rambu-rambu lalu lintas seperti larangan parkir, papan tarif parkir dll. Pihak Dinas terkait sendiri juga telah melakukan inventaris seperti memberikan seragam kerja untuk juru parkir dan karcis tanda bukti parkir yang sesuai nominal.

### **B. Saran**

Agar kegiatan retribusi parkir dapat berjalan optimal sebaiknya pihak Dinas terkait menambah jumlah personil di lapangan yang bertujuan untuk memantau kegiatan tersebut. Selain itu pihak dinas meningkatkan lagi koordinasi yang

dilakukan agar dapat mengatasi permasalahan seperti adanya gangguan preman dilapangan. Diharapkan dengan adanya penambahan jumlah personil tersebut, kegiatan retribusi parkir dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Aktor pelaksana yang ditunjuk untuk menjalankan kegiatan retribusi parkir diharapkan dapat berkomitmen, kredibel dan akuntabilitas dalam bekerja. Selain itu tepat dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. Koordinasi dengan lembaga lain juga rutin dilakukan guna menunjang tercapainya tujuan retribusi parkir itu sendiri.

#### **1. Ketepatan Kebijakan**

Adanya surat tugas dan surat perjanjian memang belum menjamin keberhasilan dalam pelaksanaan. Dalam pelaksanaannya juru parkir masih sering melakukan keterlambatan penyeteroran. Untuk itu pihak Dinas sebaiknya melakukan evaluasi penyebab hal tersebut. Apakah dikarenakan lahan parkir yang tidak memiliki potensi atau memang juru parkir yang sedang mengalami masalah kondisi ekonomi. Apabila juru parkir mengalami masalah kondisi ekonomi dapat diselesaikan dengan kekeluargaan dan jika memberi teguran yang bersifat membangun.

#### **2. Ketepatan Pelaksana**

Apabila petugas juru parkir sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, tetap dilakukan pembinaan dan pengawasan. Koordinasi yang terjalin dengan lembaga lain juga perlu ditingkatkan lagi untuk memberantas aksi premanisme dilapangan. Hal tersebut mengingat banyaknya aksi premanisme dan mereka juga tidak jera melakukan tindakan pemalakan yang sering dilakukan.

### 3. Ketepatan Target

Perlu adanya sosialisasi yang rutin dilakukan agar masyarakat mau meminta karcis bukti parkir. Hal seperti ini secara tidak langsung masyarakat mengurangi tingkat penyimpangan adanya indikasi yang dilakukan pelaksana. Selain itu juga pihak Dinas sebaiknya memberi himbauan kepada juru parkir agar mewajibkan memberi karcis parkir kepada pengguna parkir. Apabila ada juru parkir yang sakit tidak bisa melakukan tugas, sebaiknya koordinator parkir menempatkan juru parkir lain pada tempat tersebut agar tetap dapat dilakukan kegiatan retribusi parkir.

### 4. Ketepatan Lingkungan

Interaksi yang telah dilakukan memang sudah berjalan dengan baik. Untuk peran masing-masing lembaga ditingkatkan lagi agar terus tercapainya keberhasilan. Peran media masa seperti koran juga perlu agar masyarakat mengetahui tentang pelaksanaan retribusi parkir.

### 5. Ketepatan Proses

Untuk fasilitas yang diberikan mengenai rambu larangan parkir agar ditempatkan dengan jelas. Jangan ditempatkan pada area yang banyak pepohonan. Apabila pohon semakin tumbuh ranting pohon dapat menutupi rambu tersebut. Hal tersebut agar masyarakat dengan jelas melihat rambu larangan parkir. Selain itu pada jalan yang satu arah diberikan marka parkir agar pengguna nantinya memarkir pada sebelah kiri jalan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Emzir, Prof. Dr., M.pd. 2010. Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
- Islamy, M. Irfan. 2007, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Jakarta : Bumi Aksara
- Keban, Yeremias.T. 2008. Enam Dimensi Strategis Administras Publik. Yogyakarta: Gaya Media
- Moleong, Lexy, Prof. Dr., MA. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pasolong, harbani. 2011. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta
- Sri Suwitri, 2011. Konsep Dasar Kebijakan Publik. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta
- Subarsono, A.G. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Pustaka
- UtamaSyafiie, Inu Kencana. 2006. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta : Rineka Cipta
- Wahab, Abdul Solichin. 2002. Analisis Kebijakan. Jakarta : Bumi Aksara
- Winarno, Budi. 2012, Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus). Yogyakarta: CAPS

Sumber-sumber lain:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014  
tentang Pemerintahan Daerah

Undang - Undang No 33 Tahun 2004  
tentang Perimbangan Keuangan  
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 21  
Tahun 2011 tentang Retribusi  
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan  
Pekalongan Dalam Angka 2010